

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN. PERLINDUNGAN ANAK. PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Jalan M. H. Thamrin No. 11 telp. 0536 - 3224547 Palangka Raya

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

TRIWULAN - III

TAHUN 2021



Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah

> Palangka Raya 2021

[Laporan Kinerja Tahun 2021]

Hali

DAFTAR ISI

	Hai	iaman
	ISI	i
BAB i	KINERIA	1
BAB II	PERMASALAHAN DAN TINDAK LANJUT	
BAB III	PENUTUP	18
LAMPIRAN		

Kalimantan Tengah

KATA PENGANTAR

Mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviuw atas Laporan Kinerja, maka Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah menyusun Laporan Kinerja Triwulan III Tahun Anggaran 2021 yang berdasarkan pada Perjanjian Kinerja yang mengacu pada Rancangan Strategis PD Tahun 2016- 2021.

Penyusunan Laporan Kinerja ini menampilkan proses perencanaan kinerja, penganggaran kinerja, keterkaitan kegiatan/ sub kegiatan dalam pencapaian target kinerja, dan monitoring serta evaluasi pencapaian kinerja dan keuangan.

Hasil capain kinerja sasaran secara umum ada peningkatan berdasarkan pengukuran capaian kinerja dan target pada triwulan III, yang terutama dalam rencana aksi pelaksanaan kinerja. Tingkat capaian sasaran dan tujuan serta hasil yang diperoleh berorientasi pada capaian visi dan misi. Capaian pada triwuian ili merupakan tolak ukur dalam pencapaian kinerja pada triwulan selanjutnya. Masih ada beberapa target yangbelum tercapai dan akan ditingkatkan dalam upaya mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Akhirnya melalui Laporan Kinerja pada Triwulan III Tahun Anggaran 2021ini, kita harapkan agar terjadi optimalisasi peran kelembagaan dan peningkatan efisiensi, efektivitas dan produktivitas kinerja khususnya seluruh jajaran pejabat dan pelaksana di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun - tahun selanjutnya, sehingga dapat mendukung kinerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Palangka Raya, 22 Oktober 2021

DINAS PJAPPKB

DINAS P3A-PPKB

NSI KALIMANTAN TENGAH

KERALA DINAS

VICTORIA ADEN, M.M.Kes

19680717 199903 2 006

BAB I KINERJA

Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimatan Tengah sampai dengan triwulan III tahun 2021 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam penetapan kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2021 Triwulan III serta realisasinya.

Tingkat capaian masing-masing sasaran ditentukan oleh realisasi dari target masing-masing indikator kinerja dengan membandingkan nilai keseluruhan masing-masing indikator kinerja dengan jumlah indikator yang ada pada setiap sasaran. Tingkat capaian masing-masing sasaran adalah sebagai berikut:

No	Sasaran	Tingkat Capaian (%)
1	Meningkatnya Implementasi Pengarusutamaan Gender	79,49
2	Meningkatnya peran perempuan dalam jabatanpubl pendapatan keluarga	
	- Persentase perempuan di iembaga legislatif - Persentase sumbangan pendapatan perempuan	100 99,85
	dalam keluarga	99,65
3	Berkurangnya kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO	98,99
4	Meningkatnya kualitas penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO	25,5
5	Berkurangnya kasus kekerasan terhadap anak	
	- Persentase kab/kota layak anak minimal katego	ri pratama 68,88
	- Rasio anak korban kekerasan	268,88
6	Meningkatnya kualitas layanan perlindungan khusus kepada anak	97,53
7	Meningkatnya kualitas data pilah gender dan Anak	111,83
	Meningkatnya koordinasi perencanaan,	
8	pelaksanaan dan pelaporan program dan anggaran	B+
9	Menurunnya angka kelahiran	101,7
10	Meningkatnya akseptor KB	96,83
11	Menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	62,10
	JUMLAH	93,20

Tingkat capaian indikator kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah sampai dengan triwulan III tahun 2021 berdasarkan hasil pengukurannya dapat dilihat pada tabel berikut sebagai berikut :

No	Sasaran	Indikator	Satuan	Target	Target Capaian Triwulan				
		kinerja Utama		Tahun 2021	Target	Realis Canai		Keteran gan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
1	Meningkatnya Implementasi Pengarusutamaan Gender	Persentase ARG pada Belanja Langsung APBD Provinsi Kalteng	persen	3,43	2,34	1,86	79,49	Bidang Peningkatan kwalitas Hidup Perempuan	
2	Meningkatnya peran perempuan dalam jabatan pubiik dan pendapatan keluarga	Persentase perempuan di iembaga legislative	persen	28,89	35,56	35,56	100	Bidang Peningkatan kwaiitas Hidup Perempuan	
		Persentase Sumbangan pendapatan perempuan dalam keluarga	persen	33,46	33,45	33,4	99,85	Bidang Peningkatan kwalitas Hidup Perempuan	
3	Berkurangnya kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO	Rasio kekerasan terhadap perempuan	Rasio	0,0151	0,6583	6,1459	98,99	Bidang Perlindunga n Perempuan dan kwaliatas Keluarga	
4	Meningkatnya kualitas penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO	Persentase perempuan korban kekerasan yang terlayani sesuai dengan standar	persen	100	75	35	25,5	Bidang Perlindunga n Perempuan dan kwaliatas Keluarga	
5	Berkurangnya kasus kekerasan terhadap anak	Persentase Kabupaten/Kota layak anak minimal kategori pratama	persen	42,86	41,48	28,57	68,88	Bidang Perlindunga n dan Pemenuhan Hak Anak	

		Rasio anak korban kekerasan	Rasio	0,0151	0,0172	1,0083	268,88	Bidang Perlindunga n dan Pemenuhan Hak Anak
6	Meningkatnya kuaiitas iayanan perlindungan khusus kepada anak	Persentase anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan sesuai standar	persen	100	75	97,53	97,53	Bidang Perlindunga n dan Pemenuhan Hak Anak
7	Meningkatnya kualitas data pilah gender dan anak	Persentase PD yang memiliki sistem data gender dan anak	persen	15,56	14,08	15	111,83	Bidang Data
8	Meningkatnya koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan program dan anggaran	Hasil Penilaian SAKIP LHE	Skor	B+/BB	B+	B+	B+	Perencanaa
9	Menurunnya angka kelahiran	Angka kelahiran total per WUS	Total Fertility Rate (TFR)	2,24	2,28	2,28	101,7	Bidang Pengendalia n Penduduk dan Keluarga Berencana
10	Meningkatnya akseptor KB	Rasio pemakaian kontrasepsi	rasio	0,834	0,821	0,795	96,83	Bidang Pengendalia n Penduduk dan Keluarga Berencana
11	Menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	Persentase kebutuhan berkontrasepsi yang tidak terpenuhi (unmet need)	persen	16,61	17,88	11,11	62,19	Bidang Pengendalia n Penduduk dan Keluarga Berencana

Program dan Kegiatan

Program pada dasarnya merupakan kumpulan kegiatan yang dihimpun dalam satu kelompok yang sama secara sendiri maupun bersama-sama untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Program merupakan alat bagi pencapaian tujuan dan sasaran. Penetapan program dilakukan dengan melihat kebijakan, tujuan, sasaran, visi dan misi yang telah ditetapkan.

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah melaksanakan urusan wajib Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Keluarga Berencana, dan Program/kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:

No.	Program	Kegiatan		Target	Anggaran
			Sub Kegiatan		(Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		YAAN PEREMPUAN, PE LIAN PENDUDUK DAN K			20.781.682.936
A.		MERINTAHAN BIDANG 'AAN PEREMPUAN DAN SAN ANAK			1.505.000.510
l.		unjang Urusan Pemerin mantan Tengah	tahan daerah		17.683.018.536
1.		Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			121.210.910
а.			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	26.866.500
b.			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	5 Dokumen	18.300.000
C.			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Dokumen	51.699.000

d.		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Dokumen	24.345.410
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			5.963.815.328
a.		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		5.910.315.328
b.		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	12 Bulan	8.500.000
C.		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	12 Bulan	45.000.000
3.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			17.600.000
a.		Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	12 Bulan	17.600.000
4.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			582.000
a.		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	12 Bulan	582.000

5.	Administrasi Umum Perangkat Daerah			1.882.276.298
a.		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneran gan Bangunan Kantor	12 Bulan	10.000.000
b.		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Bulan	1.429.034.300
C.		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	12 Bulan	34.011.000
d.		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	12 Bulan	21.762.000
е.		Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Bulan	25.000.000
f.		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Bulan	298.072.998
g.		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12 Bulan	64.396.000
6.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			8.163.186.000
а.		Pengadaan Mebel	12 Bulan	705.866.000
b.		Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	12 Bulan	7.457.320.000
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			1.396.741.200
a.		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Bulan	4.005.000

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Provinsi Kalimantan Tengah

b.		Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	125.350.000
C.		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Bulan	1.267.386.200
8.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah			137.606.800
a		Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan		56.606.800
b.		Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		50.000.000
C.		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		12.000.000

No.	Program	Kegiatan	C. b Variator	Target	Anggaran	
			Sub Kegiatan		(Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
d.			Pemeliharaan/Re habi litasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		10.000.00	
е.			Pemeliharaan/Re habi litasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		9,000.00	
1		ENGARUSUTAMAAN I PEMBERDAYAAN			1.585.000.000	
1.		Pelembagaan Pengarusutamaa n Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi			152.245.20	
a.			Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG Kewenangan Provinsi	3 Dokumen	90.000.00	
o.			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Provinsi	3 Dokumen	62.245.20	
C.			Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Kewenangan Provinsi	3 Dokumen		
2.		Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik. Hukum. Sosial. dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakata n Kewenangan Provinsi			1.159.490.20	

No.	Program	Kegiatan	Sub Vesistes	Target	Anggaran
			Sub Kegiatan		(Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
a.			Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik. Hukum. Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	8 Dokumen	1.054.228.200
b.			Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik. Hukum. Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	8 Dokumen	105.262.000
3.		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi			114.938.000
a.			Pengembangan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	1 Dokumen	114.938.000
Ш	PROGRAM PE	RLINDUNGAN PERE	MPUAN		944.068.000
1.		Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota			231.422.400
a.			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan. Program dan Kegiatan Pencegahan	5 Dokumen	62.666.400

No.	Program	Kegiatan	Sub Kogistan	Target	Anggaran
			Sub Kegiatan		(Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi		
b.			Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	5 Dokumen	168.756.000
2.		Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota			184.825.000
a.			Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	2 Dokumen	95.200.000
b.			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	2 Dokumen	89.625.000
3.		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi			123.064.000

No.	Program	Kegiatan	0.1.1/	Target	Anggaran
			Sub Kegiatan		(Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
b.			Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	1 Dokumen	82.653.000
a.			Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	40.411.000
IV.	PROGRAM PE	NINGKATAN KUALIT	AS KELUARGA		97.157.400
1.		Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi			70.157.400
a.			Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	2 Dokumen	70.157.400
2.		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak Kewenangan Provinsi			27.000.000
a.			Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan	n	

No.	Program	Kegiatan	Sub Kanistan	Target	Anggaran
			Sub Kegiatan		(Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			Provinsi		
b.			Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	2 Dokumen	27.000.000
3.		Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya Lintas Daerah Kabupaten/Kot a			
a.			Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota		
V.	PROGRAM PE GENDER DAN	NGELOLAAN SISTEI ANAK	-		171.104.000
1.		Pengumpulan. Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi			171.104.000
a.			Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi	7 Dokumen	101.104.000

No.	Program	Kegiatan	Sub Kogister	Target	Anggaran
			Sub Kegiatan		(Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
b.			Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi	7 Dokumen	70.000.000
VI.	PROGRAM PE	MENUHAN HAK ANA	K (PHA)		273.622.200
1.		Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah. Nonpemerintah. dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi			220.825.600
a.			Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah. Non Pemerintah. Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	2 Dokumen	74.250.000
b.			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi	2 Dokumen	146.575.600
2.		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi			52.807.60
a.			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	1 Dokumen	52.807.60
VII.	PROGRAM PE	RLINDUNGAN KHUS	US ANAK		000.50
					368.564.00

No.	Program	Kegiatan	Sub Verdeton	Target	Anggaran
			Sub Kegiatan		(Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1,		Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi			315.814.000
			Penyediaan Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	1 Dokumen	89.149.000
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	1 Dokumen	226.665.000
В.	PENGENDAL	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KE BERENCANA PROVINSI KALIMANTA			222.221.000
1.	Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi Penyedia Layanan yang Me Perlindun Khusus Kewenar Provinsi Koordina Sinkronia Pelaksar Pendam Anak yar Memerlu Perlindun Khusus Kewenar Provinsi URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARG BERENCANA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk Penyera Kebijaka Penduduk Penyera	UDUK		39,440,000	
1.		Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam Rangka Pengendalian Kuantitas			39.440.000
a			Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Provinsi terhadap Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK)		

No.	Program	Kegiatan	Sub Vasiatas	Target	Anggaran
			Sub Kegiatan		(Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
b.			Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Provinsi	2 Dokumen	39.440.000
II	PROGRAM PE	MBINAAN KELUARG	A BERENCANA		138.371.000
1.		Pengembangan Desain Program. Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi. Komunikasi. Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal			138.371.000
a.			Pengembangan dan Penyediaan Materi dan Sarana Promosi. Komunikasi. Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk. Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sesuai Kearifan Budaya Lokal	2 Dokumen	73.326.000
b.			Pembinaan Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi	2 Dokumen	65.045.000
Ш		MBERDAYAAN DAN N KELUARGA SEJAH			44.410.000
1.		Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga			44.410.000
а.			Pembinaan Ketahanan dan	3 Dokumen	44.410.00

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Provinsi Kalimantan Tengah

No.	Program	Kegiatan		Target	Anggaran
			Sub Kegiatan		(Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			Kesejahteraan Keluarga		
			Pembinaan Peningkatan Akses dan		
b.			Kualitas Ketahanan Keluarga dan Remaja	n	

BAB II PERMASALAHAN DAN TINDAK LANJUT

A. Kendala dan Permasalah

Beberapa kendala yang secara umum mempengaruhi capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah sampai dengan triwulan III adalah

- a. Perubahan fungsi untuk urusan Perlindungan Perempuan dan Anak yaitu adanya pelayanan diperlukan penyesuaian baik dari sisi perencanaan penganggaran hingga tahap pelaksanaan dan evaluasi dan regulasi sebagai pendukung.
- b. Berkurangnya anggaran karena di masa pandemi covid-19 mengakibatkan kurang maksimalnya pencapaian target yang ada
- c. Kurangnya tenaga di Dinas P3APPKB sehingga pencapaian program dan kegiatan kurang maksimal.
- d. Dengan berdirinya UPT Perlindungan Perempuan dan anak di Provinsi Kalimantan Tengah diperlukan anggaran, sarana, prasarana dan tenaga professional sehingga Pelayanan dapat bejalan maksimal
- e. Perlunya Pemahaman aparatur pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah terkait tugas pokok dan fungsinya sebagai pelaksana kebijakan pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan keluarga berencana belum menyeluruh
- f. Belum maksimal pelaksanaan SOP yang menjadi acuan dalam melaksanakan tugas
- g. Masih belum optimalnya monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan.
- h. Kurangnya inovasi dalam penerapan, rencana kebijakan dan tindak lanjut kebijakan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- Bidang teknis belum memiliki rencana aksi kinerja triwulan, tahunan dan perperiode Renstra atau dokumen perencanaan yang komprehensif.
- j. Belum optimalnya koordinasi internal Perangkat Daerah terkait pencapaian kinerja.

B. indak Lanjut Penyelesaian

Beberapa tindak lanjut yang dapat diterapkan guna meminimalisir rendahnya capaian kinerja berdasarkan kendala-kendala yang dihadapi antara lain :

a. Dengan adanya UPT PPA (Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan

- Anak) sebagai fungsi pelayanan maksimal kepada masyarakat korban kekerasan diperlukan dukungan anggaran, Sumber Daya Manusia, Rumah Aman dan kegiatan-kegiatan yang memberikan pelayanan kepada masyarakat.
- b. Dalam menghadapi rasionalisasi anggaran upaya dalam mencapai target yang ada yaitu dengan menggunakan digital untuk koordinasi ke Pusat, Lintas Sektor dan Program dan Kabupaten/Kota, yang minim berusaha melaksanakan kegiatan secara elektronik baik virtual dan WA group untuk koordinasi dan evaluasi baik ke pusat dan Kabupaten/Kota.
- c. Perlu diimplementasikan target kinerja yang terdapat dalam perjanjian kinerja secara berjenjang dari eselon il sampai ditingkat eselon ili dan iV
- d. Pergub 37 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah yang memuat tugas pokok fungsi PD, dapat dijadikan acuan dalam menyusun SOP guna mendukung pelayanan.
- e. Dilakukan reviuw terhadap kinerja masing-masing bidang pelayanan menyangkut capaian program (outcome), kegiatan (output) yang dituangkan kedalam satu bentuk dokumen
- f. Membuat rencana aksi yang merupakan penjabaran target-target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja ke dalam periode bulan/triwulan/semesteran dan monitoring pencapaiannya
- g. Perlu dilakukan pengembangan kompetensi aparatur melalui diklat-diklat dan pelatihan teknis, memperbanyak koordinasi baik vertikal dan sektoral terkait bidang iayanan.
- h. Perlu adanya inovasi dan strategi dalam pencapaian target indicator Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah
- Perlu diberikannya Reward kepada Pegawai dan Pejabat yang berhasil dalam pencapaian indikator dan yang berinovasi dalam peningkatan Pencapaian dan kemajuan Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah.
- j. Periu adanya Panismen kepada pegawai dan pejabat yang belum berhasil dalam pencapaian indikator Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah.

BAB III PENUTUP

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah merupakan Instansi pemerintah yang diberi tugas, tanggung jawab dan amanah untuk melakukan perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan dibidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, kependudukan dan keluarga berencana sebagaimana ditegaskan dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah serta Perda Nomor 4 tahun 2012 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2008 tentang Organisasi dan tata kerja Inspektorat, Bappedalitbang dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. Kemudian rincian tugas, fungsi dan tata kerja diatur dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah.

Dalam melaksanakan tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah berlandaskan pada tujuan, sasaran dan program kerja yang ditetapkan baik dalam RPJMD 2016-2021, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Renstra PD Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan keluarga berencana Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2016-2021, maupun Perjanjian Kinerja antara Gubernur Kalimantan Tengah dengan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan keluarga berencana Provinsi Kalimantan Tengah.

Laporan kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan keluarga berencana Provinsi Kalimantan Tengah Tengah triwulan III tahun 2021 ini menyajikan capaian hasil baik yang mencapai target maupun yang tidak mencapai target dalam capaian strategis yang ditunjukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan keluarga berencana Provinsi Kalimantan Tengah pada Tahun 2021.

Hasil capaian kinerja sasaran yang ditetapkan secara umum dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, meskipun demikian berbagai pencapaian target indikator kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan keluarga berencana Provinsi Kalimantan Tengah memberi gambaran bahwa keberhasilan dalam pelaksanaan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana secara

Keseluruhan sangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif segenap komponen aparatur, masyarakat dan dunia usaha dan inovasi.

Laporan kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan keluarga berencana Provinsi Kalimantan Tengah triwulan III tahun 2021 disusun dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang menjadi tanggung jawab Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan keluarga berencana Provinsi Kalimantan Tengah.

Dari hasil pelaksanaan dan evaluasi kinerja yang dilaksanakan, dapat dikemukakan bahwa pelaksanaan akuntabilitas kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan keluarga berencana Provinsi Kalimantan Tengah perlu upaya – upaya dalam pencapaian keberhasilan dalam pelaksanaan tugasnya.

Terkait beberapa kendala dan kekurangan dalam pencapaian kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan keluarga berencana Provinsi Kalimantan Tengah maka beberapa rekomendasi yang dapat disarankan untuk ditindaklanjuti adalah sebagai berikut:

- Perencanaan kinerja dan anggaran perlu dilakukan secara selektif (hanya Program/Kegiatan terkait kinerja PD yang menjadi prioritas) sehingga tidak menghambat pelaksanaan program dan kegiatan dalam pencapaian target.
- Efesiensi anggaran akibat pandemi covid -19 berdampak pada efesiensi anggaran yang besar sehingga kegiatan yang sudah direncanakan tidak dapat dilaksanakan yang berpengaruh pada pencapaian target setiap triwulannya.
- 3. Kegiatan pertemuan, advokasi dan koordinasi di masa pandemi covid-19 sebagian dilakukan secara virtual, yang tidak semua daerah mempunyai kemampuan untuk melakukan secara virtual, sehingga koordinasi sering menjadi kendala dalam pencapaian indikator yang ada.
- Periunya Peningkatan dan pengembangan kapasitas SDM dilakukan lebih intensif melalui pembinaan, pendidikan dan pelatihan menyangkut Program kegiatan terkait kinerja.
- Perlunya Penambahan SDM untuk mengisi kekosongan di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan keluarga berencana Provinsi Kalimantan Tengah
- 6. Mengingat kurangnya data sektoral terkait Dinas Pemberdayaan Perempuan, Periindungan Anak, Pengendaiian Penduduk dan keluarga berencana Provinsi Kalimantan Tengah baik data primer maupun data sekunder maka perlu dilakukan inventarisasi dan survei data terkait kinerja PD terutama dari program kegiatan yang sudah dilaksanakan untuk mempermudah pengukuran hasil kinerja dan perencanaan kinerja kedepannya.

- Pemenuhan terhadap sarana dan prasarana operasional perkantoran harus diprioritaskan. Untuk itu perlu adanya perencanaan terhadap pemenuhan kebutuhanfasilitas, sarana dan prasarana penunjang.
- 8. Perlu memperkuat UPT Perlindungan Perempuan dan anak di Propinsi Kalimantan Tengah, dalam sarana, prasarana dan tenaga yang berkompoten sehingga pelayanan yang dilaksanakan dapat maksimal. Perlu adanya Promosi dan informasi dalam menginformasikan telah adanya tempat Perlindungan perempuan dan anak di Propinsi Kalimantan Tengah, yang juga melakukan pelayanan via Hotline kepada Masyarakat.
- 9. Untuk Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana diperlukan koordinasi dan bersama-sama yang efektif dengan BKKBN Perwakilan Kalimantan Tengah untuk kegiatan Program untuk pencapaian indikator yang ada terutama di masa pandemi covid -19 yang berakibat pada kegiatan pelayanan di lapangan tidak dilaksanakan.

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan keluarga berencana Provinsi Kalimantan Tengah yang bertugas dalam mendorong terwujudnya pemberdayaan perempuan, kesetaraan dan keadilan gender (KKG), terlindunginya anak dan fungsi keluarga berencana memiliki fungsi bukan sebagai pelaksana, melainkan sebagai perumus kebijakan, koordinator pelaksanaan kebijakan, advokator, fasilitator, mediator, dan inisiator. Dalam mengimplementasikan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Anak (PHA) di semua Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan lembaga masyarakat. Agar setiap Daerah Perangkat dan lembaga masyarakat tersebut dapat mengimplementasikan strategi PUG dan PHA ke dalam setiap kebijakan, program dan kegiatannya yang dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan hingga pemantauan dan evaluasinya, maka tugas awal yang paling mendasar dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah. Dan dalam implementasinya diperlukan perubahan baik itu individu dan budaya lembaga dari yang belum memahami menjadi memahami, peduli, dan tanggap (rensponsif) gender, dan dari tidak peduli terhadap hak anak menjadi peduli terhadap anak.

Oleh karena itu, indikator outcome, terlebih lagi indikator dampak (*impact*) dari keberhasilan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah lebih dan tidak dapat diukur dalam jangka waktu yang relatif pendek (satu tahun). Dengan adanya visi dan misinya, maka keberhasilan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah pada hakekatnya tersebar sebagai bagian dari keberhasilan semua Perangkat Daerah dan lembaga masyarakat dalam mengintegrasikan ataupun mempertimbangkan isu gender, perempuan dan anak ke dalam kebijakan, program dan kegiatannya.

proses pencapaian tujuan dan penetapan ukuran Kendati keberhasilan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah bersifat kompleks, cenderung bernuansa kualitatif dan acap kali merupakan output dari para pemangku kepentingan (stakeholders), bukan berarti kinerja PD ini tidak dapat diukur karena ada fungsi pelayanan yaitu pada Perlindungan Perempuan dan Anak dalam bentuk UPT Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Kalimantan Tengah.

> Palangka Raya, 22 Oktober 2021 DINAS P3APPKB

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PIL KEPALA DINAS

* (DINAS P3A-P)

Pentaná řingkat I

dr. LINA VICTORIA ADEN, M.M.Kes

NIP. 19680717 199903 2 006

LAMPIRAN Nama SOPD LAPORAN TRIWULAN III TAHUN 2021

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan

Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah

A Target Realisasi Kinerja

No		Indikator	Satua	Target	Target (Capaian Tri	wulan III	Ket
	Sasaran	kinerja Utama	n	Tahun 2021	Target	Realisa si	Capaia n (%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatnya Implementasi Pengarusutama an Gender	Persentase ARG pada Belanja Langsung APBD Provinsi Kalteng	persen	3,43	2,34	1,86	79,49	Bidang Peningkatan kwalitas Hidup Perempuan
2	Meningkatnya peran perempuan dalam jabatan publik dan	Persentase perempuan di lembaga legislative	persen	28,89	35,56	35,56	100	Bidang Peningkatan kwalitas Hidup Perempuan
	pendapatan keluarga	Persentase Sumbangan pendapatan perempuan dalam keluarga	persen	33,46	33,45	33,4	99,85	Bidang Peningkatan kwalitas Hidup Perempuan
3	Berkurangnya kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO	Rasio kekerasan terhadap perempuan	Rasio	0,0151	0,6583	6,1459	98,99	Bidang Perlindungan Perempuan dan kwaliatas Keluarga
	Meningkatnya kualitas penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO	Persentase perempuan korban kekerasan yang terlayani sesuai dengan standar	persen	100	75	35	25,5	Bidang Perlindungan Perempuan dan kwaliatas Keluarga
	Berkurangnya kasus kekerasan terhadap anak	Persentase Kabupaten/Ko ta layak anak minimal kategori pratama	persen	42,86	41,48	28,57	68,88	Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak

No		Indikator	Satua	Target	Target (Capaian Tri		Ket
	Sasaran	kinerja Utama	n	Tahun 2021	Target	Realisa si	Capaia n (%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		Rasio anak korban kekerasan	Rasio	0,0151	0,0172	1,0083	268,88	Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak
6	Meningkatnya kualitas layanan perlindungan khusus kepada anak	Persentase anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan sesuai standar	persen	100	75	97,53	97,53	Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak
7	Meningkatnya kualitas data pilah gender dan anak	Persentase PD yang memiliki sistem data gender dan anak	persen	15,56	14,08	15	111,83	Bidang Data
8	Meningkatnya koordinasi perencanaan, pelaksariaan dan pelaporan program dan anggaran	Hasil Penilaian SAKIP	Skor	B+/ BB	B+	B+	B+	Perencanaan
9	Menurunnya angka kelahiran	Angka kelahiran total per WUS	Total Fertility Rate (TFR)	2,24	2,28	2,28	101,7	Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
10	Moningkatnya akseptor KB	Rasio pemakaian kontrasepsi	rasio					Bidang Pengendalian
				0,834	0,821	0,795	96,83	Penduduk dan Keluarga Berencana
11	Menurunnya kebutuhan ber- KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	Persentase kebutuhan berkontraseps i yang tidak terpenuhi (unmet need)	persen	16,61	17,88	11,11	62,19	Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

TABEL REALISASI KEUANGAN DAN FISIK APBD PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN ANGGARAN 2021 PER 30 SEPTEMBER 2021

					Realisa	si TW I) I			
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu (Rp)	Target TW III	Keuangan		Fisik		Ket	
			Rp	Rp %		Rp	0/1		
	2	3	4	5	6	4	7	8	
	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB	20.781.682.936	15.506.215.476	8.571.564.455	41,25	11.660.329.042	56,11		
A	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	1.505.000.510	1.298.850.848	660.357.554	43,88	674.675.554	44,83		
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	17.683.018.536	13.702.612.276	7.060.787.029	39,93	10.149.551.616	57,40		
1.1	Perencanaan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	121.210.910	59.847.748	33.067.000	27,28	47.385.000	39,09		
	Penyusunan Dc kumen Perencanaan Perangkat Daerah	26.866.500	21.024.750	15.905.000	59,20	15.905,000	59,20		
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen R (A-SKPD	18.300.000	12.199.998	11.988.000	65,51	11.988.000	65,51		
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capalan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	51.699.000	26.623.000	5.174.000	10,01	19.492.000	37,70		
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	24.345.410	-		0,00	•	0,00		
1.2		5.963.815.328	5.939.215.328	4.046.079.135	67,84	4.046.079.135	67,84		
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.910.315.328	5.910.315.328	4.033.181.135	68,24	4.033.181.135	68,24		
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kelangan Akhir Tahun SKPI)	8.500.000	8.500.000	8.500.000	100,00	8.500.000	1.00,00		
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggarar	45.000.000	20.400.000	4.398.000	9,77	4.398.000	9,77		
1.3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	17.600.000	17.600.000	3.400.000	19,32	-	0,00		
	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	17,600.000	17.600.000	3,400.000	19,32		0,00		
1.4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	582.000	582.000	582.000	100,00	582.000	лоо,оо		
-	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	582,00()	582,000	582.000	100,00	582.000	1,00,00		
1.5	Administrasi Umum Perangkat Dacrah	1.882.276.298	812.502.033	215.631.750	11,46	1.326.723.750	70,49		
Section.	Penyediaan Koinponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.000.000	10.000.000	6.500.000	65,00	6.500.000	65,00		
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.429.034.30()	509.760.240	18.421.400	1,29	1.129.513.400	79,04		
-	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	34.011.000	34.011.000	20.243.500	59,52	20.243.500	59,52		
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	21.762.000	16.335.000	10.890.000	50,04	10.890.000	50,04		
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	25.000.000	21.000.000	12.750.000	51,00	12.750.000	51,00		
	Penyelenggarakin Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	298.072.998	197,547,998	146.826.850	49,26	146.826.850	49,26		
	Dukungan Pela sanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	64.396.000	23.847.800		0,00	-	0,00		
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	8.163.186.000	5.907.472.000	1.840.192.740	22,54	3.306.949.327	46,64		
	Pengadaan Mebel	705.866.000	481.762.000	2.892.100	0,41	2.892.100	0,41		
	Pengadaan Gecung Kantor atau Bangunan Lainnya	7.457.320.000	5.425.710.000	1.837.300.640	24,64	3.804.057.227	51,01		
1.7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.396.741.200	855.325.157	853.923.800	61,14	353.921.800	61,14		
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.005.000	4.005.000	4.005.000	100,00	4.005.000	1,00,00		
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	125.350.000	105.350.000	48.872.750	38,99	48.872.750	38,99		

	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.267.386.200	745.970.157	801.046.050	63,20	801.044.050	63,20
1.8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	137.606.800	110.068.005	67.910.604	49,35	67.910.604	49,35
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan	56.606.800	32.381.000	23.783.600	42,02	23.783.600	42,02
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dina: Operasional atau	50.000.000	46.687.005	25.645.004	51,29	25.645.004	51,29
	Pemeliharaan Feralatan dan Mesin Lainnya	12.000.000	12.000.000	8.285.000	69,04	8.285,000	69,04
_	Pemeliharaan/Flehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	10,000.00()	10.000.000	9.997.000	99,97	9.997.000	99,97
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan P asarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	9.000.000	9.000.000	200.000	2,22	200.000	2,22
2	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	1.426.673.400	371.411.200	764.706.000	53,60	764.706,000	53,60
2.1	Pelembagaari Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lernbaga Pemerintah Kewenangan	152.245.200	152.245.200	92.885.200	61,01	92.885.200	61,01
	Provinsi Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan P JG Kewenangan Provinsi	90.000.000	90.000.000	49.240.400	54,71	49.240.400	54,71
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaar PUG Kewenangan Provinsi	62.245.200	62.245.200	43.644.800	70,12	43.644.800	70,12
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Kewenangan Provinsi	*	-	-	#DIV/01	•	#DI\//0!
2.2	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyaraka tan Kewenangan Produsi	1.159.490.200	104.228.000	636.949.800	54,93	536.949.800	54,93
	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	1.054.228.200	104.228.000	636.949.800	60,42	636,949.800	60,42
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewe tangan Provinsi	105.262.00()	•	-	0,00	•	0,00
2.3	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan	114.938.000	114.938.000	34.871.000	30,34	34.871.000	30,34
	Pengembangar Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	114.938.000	114.938.000	34.871.000	30,34	34.871.000	30,34
3	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	539.311.400	517.234.900	314.613.072	58,34	314.613.072	58,34
3.1	Pencegahan Kekerasan terhadap Ferempuan yang melihatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	231.422.400	231.296.400	129.747.000	56,07	129.747.000	56,07
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaar Kebijakan, Program dar Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi	62.666.400	62.540.400	17.135.900	27,34	17.135.900	27,34
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	168.756.000	168.756.000	112.611.100	66,73	112.611.100	66,73
	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	184.825.000	158.875.500	67.742.072	36,65	67.742.072	36,65
	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	95.200.000	86.021.500	34.122.072	35,84	34.122.072	35,84
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaar Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	89.625.0(0	72.854.000	33.620.000	37,51	33.620.000	37,51
3.3	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan	123.064.000	127.063.000	117.124.000	95,17	117.124.000	95,17
_	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	40.411.000	44.410.000	40.411.000	100,00	40.411.000	1.00,00
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Ke uarga Kewenangan Provinsi	82.653,00()	82.653.000	76.713.000	92,81	76.713.000	92,81
4	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	97.157.400	97.157.400	80.071.250	82,41	80.071.250	82,41
	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi	70.157.400	70.157.400	53.271.250	75,93	53.271.250	75,93

	Pengembangar Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	70.157.400	70.157.400	53.271.250	75,93	53.271.250	75,93	
4.2	Penguatan dan Pengembangan Le mbaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Ariak Kewenangan Provinsi	27,000.000	27.000.000	26.800.000	99,26	26.800.000	99,26	
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Ke uarga Kewenangan Provinsi				#DIV/01		#DIV/0!	
	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	27,000.000	27.000.000	26.800.000	99,26	26.800.000	99,26	
4.3	Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya Lintas Daerah Kabupater / Kota		-		#DIV/0!	-	#DI\\/0!	
	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dari Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	*	-	•	#DIV/01	•	#DIV/0!	
5.	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	171.104.000	76.083.500	55.003.200	32,15	55.003.200	32,15	
5.1	Pengumpulan, Pengolahan Analisi: dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam	171.104.000	76.083.500	55.003.200	32,15	55.003.200	32,15	
	Penyediaan Data di Tingkat Daerah Provinsi Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi	101.104.000	35.738.500	17.408.200	17,22	17.408.200	17,22	
	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelempagaan Data Provinsi	70.000.00	40.345.000	37.595.000	53,71	37.595.000	53,71	
6	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	273.633.200	253.321.200	143.255.600	52,35	143.255.600	52,35	
6.1	Pelembagaari PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	220.825.600	220.825.600	143.255.600	64,87	143.255.600	64,87	
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga	74.250.000	74.250.000	34.312.500	46,21	34.312.500	46,21	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi	146.575.600	146.575.600	108.943.100	74,33	108.943.100	74,33	
6.2	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak	52.807.600	32.495.600	-	0,00	-	0,00	
	Kewenangan Provinsi Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaar Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	52,807,600	32.495.600	•	0,00		0,00	
7	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	368.564.000	305.614.000	81.341.604	22,07	81.341.604	22,07	
7.1	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan	315.814.000	305.614.000	81.341.604	25,76	81.341.604	25,76	
	Penyediaan Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	89.149.000	78.949.000	39.372.500	44,16	39.372.500	44,16	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaar Pendampingan Anak yang memerlukan Perlindurigan Khusus Kewenangan Provinsi (DAK)	226.665.00()	226.665.000	41.969.104	18,52	41.969.104	18,52	
7.2	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kots	52.750.000	-	-	0,00	-	0,00	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Provinsi	52.750.000	•	-	0,00	30	0,00	
8	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	39.440.000	-	-	0,00		0,00	
8.1	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	39.440.000	-	-	0,00		0,00	
	Penyerasian Kebijakan Pembangunan Dijerah Provinsi terhadap kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan (eluarga (KKBPK)	-	•	-	#DIV/0!	•	#DIV/0!	
	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Provinsi	39.440.000	-		0,00	-	0,00	

9	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	138.371.000	138.371.000	71.786.700	51,88	71.786.700	51,88
9.1	Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Korsunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai	138.371.000	138.371.000	71.786.700	51,88	71.786.700	51,88
	Pengembangar dan Penyediaan Materi dan Sarana Promosi, Koniunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk, Keluarga Berer cana dan Pembangunan Keluarga Sesuai Kearifar Budaya Lokal	73.326.0(0	73.326.000	71.786.700	97,90	71.786.700	97,90
	Pembinaan Promosi dan Konseling Kesenatan Reproduksi	65.045.000	65.045.000		0,00		0,00
10	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUAFGA SEJAHTERA (KS)	44.410.000	44.410.000		0,00	•	0,00
	Pengelolaan Pelaksanaan Desain Frogram Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan	44.410.000	44.410.000		0,00		0,00
	Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	44.410.000	44.410.000		0,00		0,00
	Pembinaan Per ingkatan Akses dan Kual tas Ketahanan Keluarga dan Remaja	-	•		#DIV/01		#DIV/0!
	T CITION CONT. T. T	20.781.682.936	15,506.215.476	8,571,564,455	41,25	11.660.329.042	56,11

LAMPIRAN BIDANG

: LAPORAN TRIWULAN III TAHUN 2021

: PEFLINDUNGAN PEREMPUAN DAN KUALITAS KELUARGA

-				Triwulan II	1	Perhitungan		Realisasi (TW. III)	
No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Satuan	TW. III	Rumus Perhitungan	Sumber	Realisasi	Persentase (%)
1.	Berkurangnya kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO	Rasio kekerasan terhadap perempuan	0,0151 Resio 0		0,6583	0,6583 (Jumlah Korban perempuan dibagi jumlah penduduk perempuan dikalikan 1000)		6,1459	100,16 %
2.	Meningkatnya kualitas penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO	Persentase perempuan korban kekerasan yang terlayani sesuai dengan standar	100	Persen	75	(Jurnlah perempuan korban kekerasan yang dilayani sesuai standard dibagi jumlah laporan perempuan korban kekerasan yang masuk dikali 100)	Dinas P3APPKB (UPT-PPA) Data Simfoni	34	43,58 %

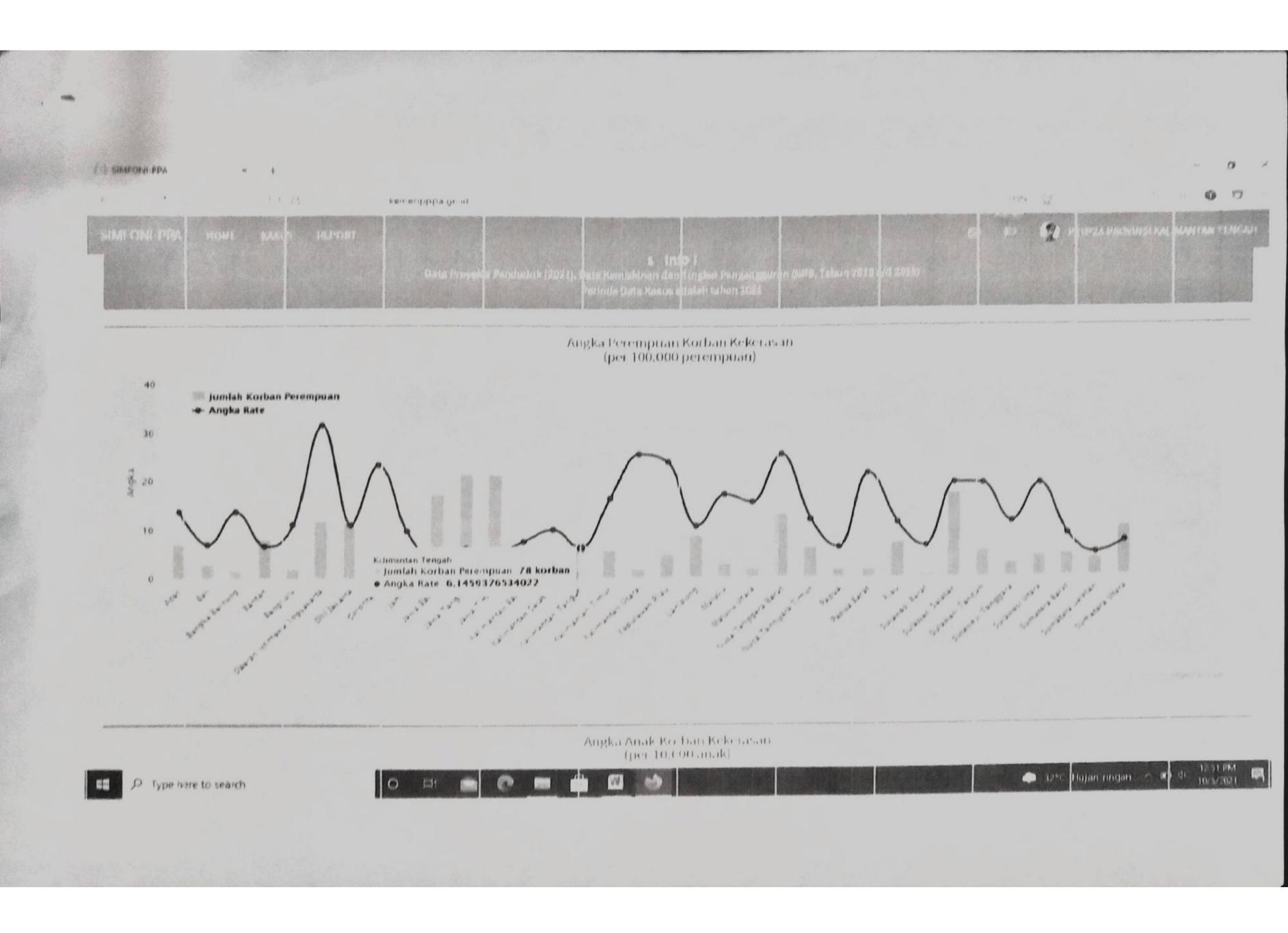
Keterangan

- √ Rasio perempuan korbar kekerasan per 100.000 perempuan berdasarkan data SIMPONI: 6.1459
- ✓ Capaian Rasio perempuan korban kekerasan (78/1.269.159) * 1000 = 0.061458 %
- ✓ Jumlah perempuan korban kekerasan Trivulan III se Kalteng berdasarkan data SIMPONI : 78 korban
- ✓ Korban perempuan yang terlayani Ttriwulan III: 34 korban
- ✓ Persentase perempuan korban kekerasan : (34/78) * 100 = 43,58 %

Palangka Raya, Oktober 2021

Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Kualitas Keluarga DP3APPKB Proy. Kalteng

> Dra. MARWATI SUKWATINI Pembina Tingkat I NIP. 19650305 199303 2 006



LAMPIRAN

: LAPORAN TRIWULAN III TAHUN 2021

BIDANG : PERLINDUNGAN dan PEMENUHAN HAK ANAK

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Triwulan III			Perhitungan		Realisasi (TW. III)	
			Target	Satuan	TW. III	Rumus Perhitungan	Sumber	Realisasi	Persentase (%)
1.	Berkurangnya kasus kekerasan terhadap anak	Persentase Kabupaten/Kota Layak Anak Minimal Kategori Pratama	42,86	Persen	41,48	(Jumlah Kab/Kota Layak Anak Kategori Pratarna di Kalteng dibagi Jumlah Kab/Kota di Kalteng) Dikali 100	Dinas P3APPKB	28,57	68,88
		Rasio anak korban kekerasan	0.015	Rasio	0,0172	(Jumlah anak korban kekerasan dibagi Jumlah Anak di Kalteng) Dikali 100	Dinas P3APPKB (UPT-PPA)	1,0083	268,88
2.	Meningkatnya kualitas layanan perlindungan khusus kepada anak	Persentase anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan sesuai standar	100	Persen	75	(Jumlah anak korban kekerasan yang dilayani sesuai standart dibagi Jumlah Laporan anak korban kekerasan yang masuk) Dikali 100	Dinas P3APPKB (UPT-PPA)	97,53	97,53

Keterangar:

- ✓ Kabupaten/Kota Layak Anak yang mendapat peringkat PRATAMA: 4 Kabupaten/Kota
- ✓ Realisasi Kabupaten/Kota Layak Anak: 4/14: 0,2857 x 100 % = 28,57 %
- ✓ Persentase KLA: 28,57 /41,48, x 100 % = 68,83 %
- ✓ Rasio anak korban kekerasan per 10.000 anak berdasarkan data SIMPONI: 1,0083
- ✓ Capaian Rasio anak korban kekerasan: (1,0083/0,00375) x 100% = 268,88 %
- ✓ Jumlah anak korban kekerasan Triwulan III:81 korban
- ✓ Korban anak yang terlayani triwulan III : 79 korban
- ✓ Persentase anak korban kekerasan : (79/81) * 100% = 97,53 %

Palangka Raya, Oktober 2021

Kepala Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak

DP3APPKB Prov. Kalteng,

MULYO SUHARTO, SH Penata Tingkat I NIP. 19690501 499003 1 009

